



Jawa Barat



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2016, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016.

Penyusunan LAK tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

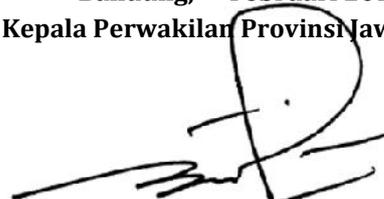
Pengukuran Kinerja Tahun 2016 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangani pada tanggal 29 Januari 2016 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2016.

Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi real pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Akhir kata, tugas BPK RI sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Bandung, Februari 2017
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Arman Syifa

NIP. 19690404 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	3
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	5
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	5
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)	17
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada September 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2016 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

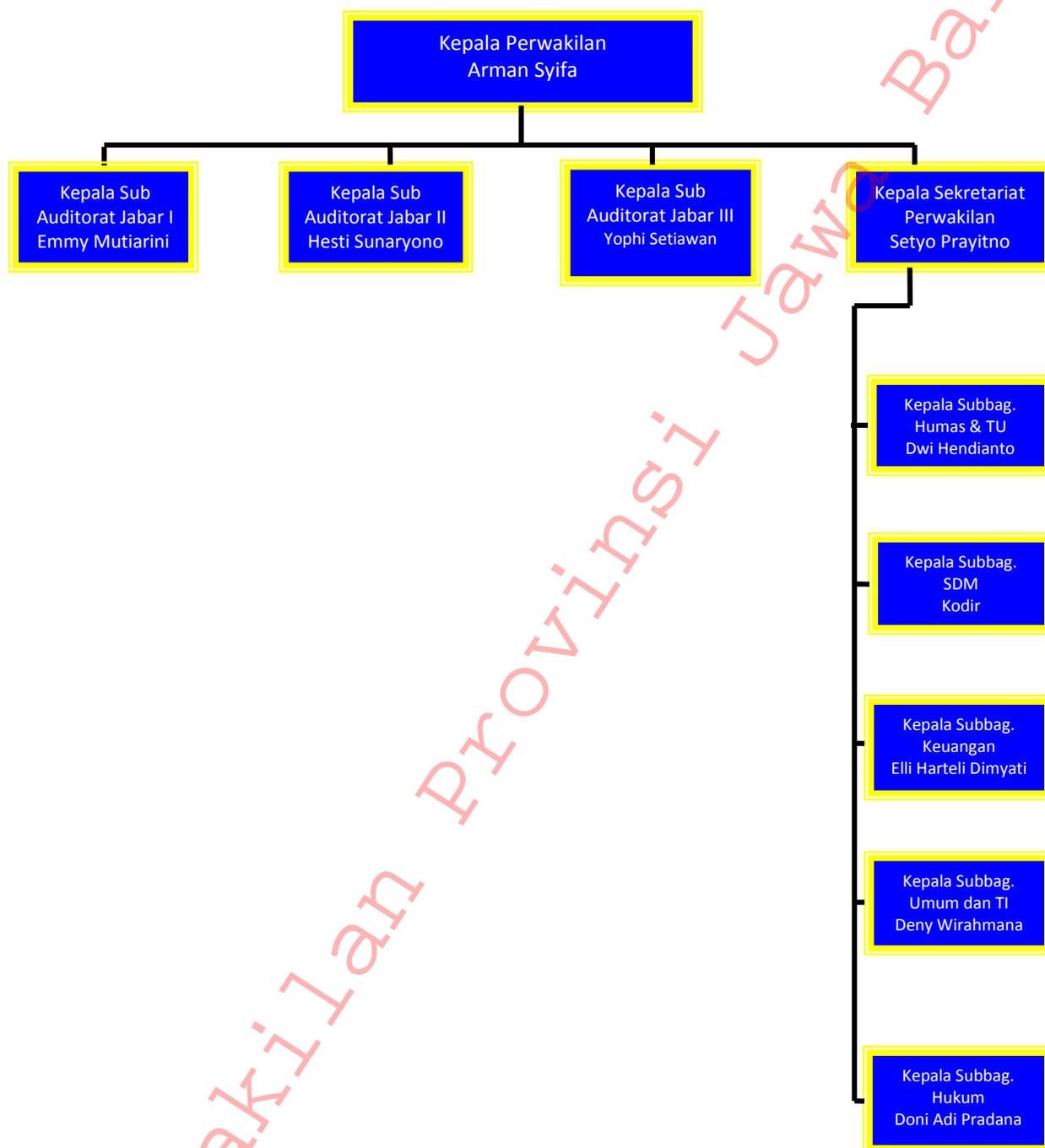
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Jawa Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Sub Auditorat Jawa Barat I

Sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Sub Auditorat Jawa Barat II

Sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Sub Auditorat Jawa Barat III

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

4. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat per bulan Desember 2016 berjumlah 178 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 116 orang staf fungsional/teknis dan 53 orang staf penunjang pendukung. Pagu anggaran Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2016 sebesar Rp43.070.557.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.280.105.044,00 atau 91,19% dari total anggaran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 - 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi : "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020, yaitu :

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung tujuan strategis yang akan dicapai, maka BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS), yaitu:

SS 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan

Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

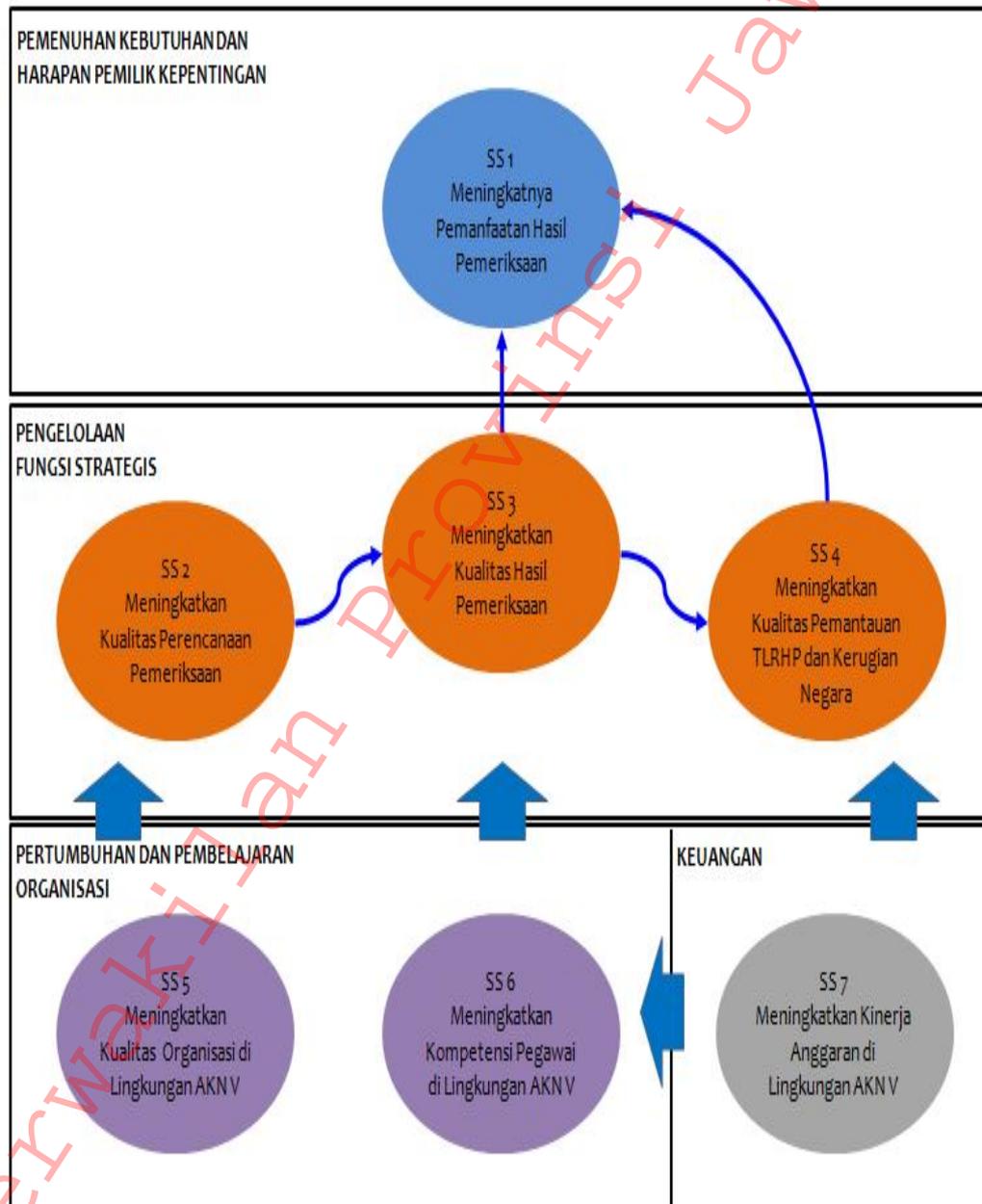
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

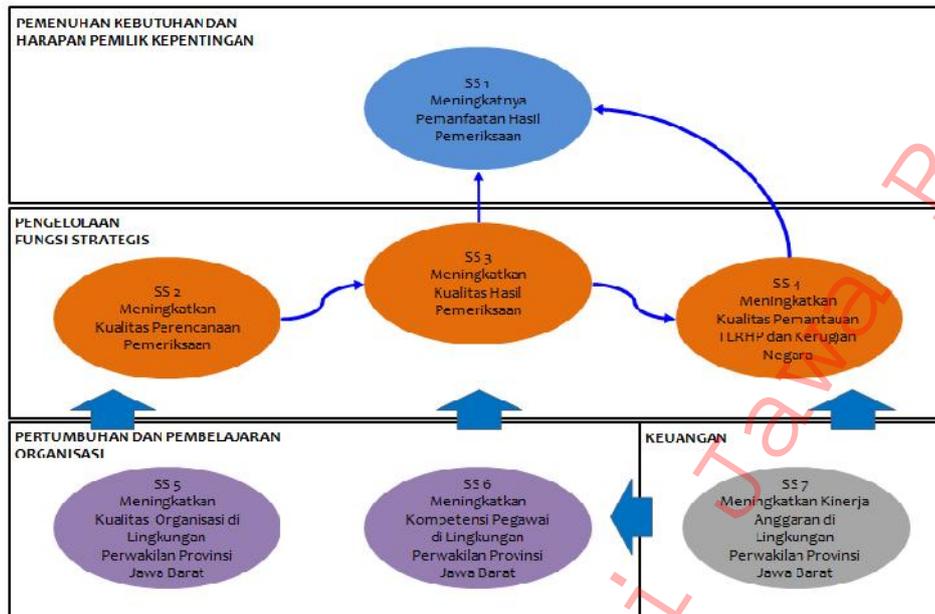
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei

atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan dengan Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peta strategis tersebut merupakan turunan dari Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan pendukung pencapaian sasaran strategis AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V dan Peta Strategi Perwakilan Provinsi Jawa Barat :



Gambar 2.1 – Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK



Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dari Peta Strategi di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peranan dalam mewujudkan Sasaran Strategis BPK dengan menetapkan sembilan sasaran strategi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 telah menyusun 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus ditetapkan pencapaiannya sebagai berikut:

SS	Indikator Kinerja	
SS 1	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
	1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara
	1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
	1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
SS 2	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
	2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP
	2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP
SS 3	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

SS	Indikator Kinerja	
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
SS 4	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
	4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
SS 5	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice
	5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
SS 6	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
	6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
SS 7	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%
	IKU 2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%
	IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	16%	17%	18%	20%
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A
	IKU 2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
	IKU 4. Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
	IKU 5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 7. Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	92%	93%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 29 Januari 2016. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang tertuang dalam PK Tahun 2016, yaitu :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
			Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan
	IKU 2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	
	IKU 4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI
	IKU 5.3	Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0	
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan humas
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target	Kegiatan	
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Memenuhi Pelatihan	Pemeriksa Standar	yang Jam	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan diklat pegawai
	IKU 6.2	Persentase Memenuhi Pelatihan (Non Pemeriksa)	Pemeriksa Standar Teknis/Manajerial	yang Jam	90%	
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Anggaran Perwakilan	Kinerja Implementasi di Lingkungan		80%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

Dalam rangka mencapai target IKU Tahun 2016 yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2016, yang menetapkan target kinerja setiap triwulanan selama satu tahun. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

(1)	Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2016	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Keterangan
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	60%	60%	60%	60%	Desember	
IKU 1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	0	3,6	3,6	3,6	Desember	
IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU bonus
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU bonus
IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU bonus
IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0	0	1	Desember	
SS2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
IKU 2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	0%	85%	85%	85%	Desember	
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	15%	0%	0%	10%	15%	Desember	
IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
SS3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	

IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 3.2	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	0	100%	100%	100%	Desember	
SS4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	0	28	28	56	Desember	
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	
SS5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	0	0	0	A	Oktober	IKU Tahunan dalam bentuk indeks/nilai evaluasi yang realisasinya ada di bulan Oktober
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%	0%	0%	0%	0%	Desember	IKU tidak ditargetkan di tahun 2016
IKU 5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	0%	0%	0%	0%	Desember	IKU tidak ditargetkan di tahun 2016
IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%	Februari	
IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IK 5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	0	1	1	2	Desember	
IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	80%	83%	85%	90%	Desember	
SS6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan							
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	30%	50%	80%	100%	Desember	
IK 6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	90%	25%	50%	70%	90%	Desember	
SS7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan							
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	15%	40%	60%	80%	Desember	

Namun demikian, pada semester II Tahun 2016 terdapat revisi atas Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) yang mempengaruhi IKU 2.2 (Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP) yang sebelumnya target adalah 15% menjadi 22%. Oleh karena itu, rincian Sasaran target IKU 2016 (setelah revisi RKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (setelah revisi RKP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	22%
	IKU 2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56
	IKU 4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
	IKU 5.3	Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berdasarkan hasil validasi semester II Tahun 2016 adalah 96,15. Skor kinerja Tahun 2016 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan skor Tahun 2015 sebesar 92,69. Peningkatan skor kinerja ini terutama disebabkan karena:

1. sebanyak 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai atau melebihi target yang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;
2. sebanyak enam IKU dengan skor <100 (55,33 s.d. 85,45);
3. terdapat dua IKU bonus (IKU 1.3 dan IKU 1.5) yang tidak terdapat realisasinya. Namun demikian, dikarenakan IKU bonus, maka ketiadaan realisasi tidak mengurangi skor kinerja; dan
4. terdapat dua IKU (IKU 5.3 dan IKU 5.4) yang belum dihitung pada Tahun 2016.

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor Kinerja
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	60,17%	100,29
IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,26	105
IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	0%	0
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	102%	102
IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	0%	0
IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	22%	22,50%	102,30
IKU 2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	65,82%	65,82
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor Kinerja
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100
IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	55,33%	55,33
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	62,50%	62,50
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	79,36%	79,36
IKU 5.3	Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100
IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100
IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100
IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100
IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3,4	105
IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	105
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	85,45%	85,45
IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	62,90%	69,89
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	91,40%	105

Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk semua sasaran strategis sebagai berikut:

SS.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan enam IKU, yaitu IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 - Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, IKU 1.3 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara, IKU 1.5 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.6 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

1. IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan.

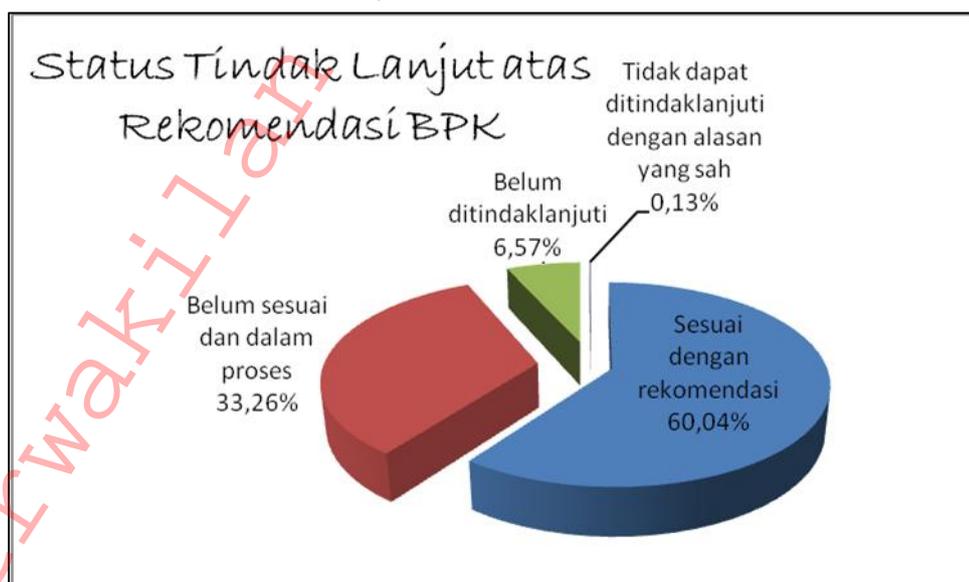
Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.2. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	5.831	60,04%
2	Belum sesuai dan dalam proses	3.230	33,26%
3	Belum ditindaklanjuti	638	6,57%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	13	0,13%
	Jumlah Rekomendasi yang disampaikan	9.712	100%



Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Pencapaian atas IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2016 mencapai 60,17% dari 60% target yang ditetapkan dengan skor 100,29.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 1.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	60,17%	100,29	N/A	N/A

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 60,17%. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan capaian tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan setiap semester selama kurun waktu tahun 2016 dengan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayah Jawa Barat. Selain itu, peningkatan capaian tersebut juga dipengaruhi dengan adanya penurunan target, yaitu 65% pada tahun 2015 menjadi 60% pada tahun 2016.

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%	60,17%

2. IKU 1.2 – Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini antara lain dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Pencapaian atas IKU 1.2 - Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK untuk tahun 2016 mencapai 4,26 dari target indeks sebesar 3,6 yang ditetapkan dengan skor 105.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 1.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,26	105	N/A	N/A

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	4,26

3. IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK yaitu pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Untuk tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum pernah melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH), sehingga realisasi capaian IKU 1.3 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 1.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	0%	0	N/A	N/A

Meskipun capaian IKU 1.3 pada tahun 2016 adalah 0, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	0%

4. IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut mewajibkan BPK untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Selama tahun 2016, terdapat dua Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan dan disampaikan kepada IPH. Kedua laporan tersebut adalah:

- LHP PKD atas Kegiatan Penyaluran BJB KPR dan Consumer Mortgage pada Bank BJB Karang Ampel Tahun 2014; dan
- LHP PKD atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Realisasi capaian atas IKU 1.4 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 1.4 - Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	102%	102	N/A	N/A

IKU 1.4 ini merupakan IKU bonus, sampai dengan Desember 2016 realisasi atas IKU ini mencapai 102% yang melebihi target PK Tahun 2016, yaitu 100%.

Perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	102%

5. IKU 1.5 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli ini diberikan berdasarkan LHP BPK dan dilakukan dalam rangka mendukung pemberantasan praktek korupsi atas keuangan negara.

Untuk tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum pernah permintaan Pemberian Keterangan Ahli oleh Pengadilan, sehingga realisasi capaian IKU 1.5 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 1.5 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	0%	0	N/A	N/A

Meskipun capaian IKU 1.5 pada tahun 2016 adalah 0, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan realisasi IKU 1.5 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	0%

6. IKU 1.6 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

Pemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam memberikan pendapat, maka seluruh satker pemeriksaan termasuk Perwakilan Provinsi Jawa Barat di dorong untuk memberikan masukan kepada Ditama Revbang.

Selama tahun 2016 terdapat satu usulan bahan pendapat dari Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang, yaitu: "Penghapusan Piutang PBB P2 yang telah Kadaluarsa" dan "Pemotongan Tunjangan Sertifikasi Guru dalam kaitannya dengan Pemenuhan Kewajiban 24 jam Mengajar Seminggu". Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaian untuk IKU 1.6. ini adalah 1 dengan score 100. Realisasi capaian IKU 1.6 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU 1.6 - Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 1.6 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	1

SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 2.1 - Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, IKU 2.2 - Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP, dan IKU 2.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian LHP.

1. IKU 2.1 - Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

IKU 2.1. ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan revisi atas RKP Tahun 2016 sebanyak 2 kali, hal ini dikarenakan adanya penambahan output dari Pemeriksaan Kinerja (mengikuti Tematik Pemeriksaan Kinerja pada AKN V dan AKN VI) dan output LHP PKN/D, namun penambahan atas output tersebut tanpa menambah anggaran.

Realisasi capaian IKU 2.1 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU 2.1 - Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 2.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%	85%

2. IKU 2.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Tujuan IKU 2.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dalam Tahun 2016 mencapai 9 LHP dari seluruh jumlah LHP yang diterbitkan selama tahun 2016 yaitu sebanyak 40 LHP (non Banpol dan PKN).



Gambar 3.2. Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Realisasi capaian IKU 2.2 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKU 2.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	15% Menjadi 22% (karena ada revisi output RKP)	22,50%	102,30	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 2.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	15% menjadi 22% (karena ada revisi output RKP)	16%	17%	18%	20%	22,50%

3. IKU 2.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas pemeriksaan/stakeholder berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. Pengukuran IKU ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDDT (tidak termasuk Banpol dan PKN), dan kinerja pada periode tertentu.

Pencapaian IKU ini dalam Tahun 2016 adalah 65,82% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 65,82. Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan penyelesaian Hasil Pemeriksaan pada Triwulan II tidak semuanya dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, terlambatnya penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dikarenakan beberapa entitas yang terlambat menyerahkan LK *Unaudited* dan penerapan pertama kali dari Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha selalu berkoordinasi dengan entitas, sehingga diharapkan untuk tahun 2017, penyerahan LK *Unaudited* oleh entitas tidak terlambat atau terkendala, sehingga pelaksanaan pemeriksaan LK dan penyerahan/penyampaian LHP dapat tepat waktu.

Realisasi capaian IKU 2.3 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU 2.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	65,82%	65,82	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 2.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
2.3. Ketepatan Waktu Penyerahan LHP	100%	100%	100%	100%	100%	65,82%

SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 3.1 - Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan, IKU 3.2 - Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, dan IKU 3.3 - Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP.

1. IKU 3.1 – Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dalam rangka mengendalikan mutu pemeriksaan. Pemenuhan skor atas IKU 3.1 dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Untuk tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan *Quality Control* sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan skor 100.

Realisasi capaian IKU 3.1 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IKU 3.1 - Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 3.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. IKU 3.2 - Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

Quality Assurance dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu (quality control) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan Quality Assurance dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Sama dengan QC, pemenuhan skor atas IKU 3.2 ini dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Pada tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan quality assurance sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan skor 100. Realisasi capaian IKU 3.2 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IKU 3.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan (QA)	100%	100%	100	100	100

Perbandingan realisasi IKU 3.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Uraian	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan (QA)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. IKU 3.3 – Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi dalam penyusunan LHP agar LHP tidak mengandung kesalahan (zero defect) dan 100% akurat. Konsistensi dan akurasi merupakan syarat mutlak dalam penyajian LHP untuk menghindari adanya gugatan oleh pihak-pihak terkait. Realisasi capaian IKU 3.3 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU 3.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	55,33%	55,33	N/A	N/A

Tidak tercapainya target IKU 3.3, dikarenakan berdasarkan hasil revidi dari Direktorat EPP pada Semester I dan Semester II Tahun 2016 menunjukkan masih terdapat permasalahan atas akurasi dan konsistensi dalam penyajian LHP yang diterbitkan. Dengan rata-rata tingkat konsistensi dan akurasi, yaitu : Untuk LHP LKPD sebesar 38%, LHP Kinerja sebesar 93%, dan LHP DTT sebesar 35%.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berupaya untuk lebih meningkatkan keakurasian dan konsistensi dalam penyajian LHP yang diterbitkan untuk Tahun 2017, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Perbandingan realisasi IKU 3.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	55,33%

SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 4.1 - Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IKU 4.2 - Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan IKU 4.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

1. IKU 4.1 - Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Realisasi capaian IKU 4.1 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IKU 4.1 - Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
4.1	Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100 %	100%	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 4.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
4.1. Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. IKU 4.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. IKU 4.2 bertujuan untuk mendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2016 adalah sejumlah 56 LHP dengan skor kinerja 100. Nilai IKU 4.2 ini telah mencapai target yang ditetapkan sejumlah 56 LHP. Berikut adalah realisasi capaian IKU 4.2 Tahun 2016:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU 4.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	56	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 4.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56	56

3. IKU 4.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Merupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan Perwakilan ke Ditama Revbang (d.h.i Direktorat EPP) dengan tembusan Ditama Binbangkum. Bertujuan untuk mengukur ketepatan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dengan tepat waktu. Realisasi capaian IKU 4.3 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IKU 4.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	62,50%	62,50	N/A	N/A

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2016 adalah sejumlah 56 LHPT Runeg, namun demikian penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2016 yang disampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang hanya 7 LHPT Runeg dari 28 LHPT, hal ini dikarenakan mundurnya pelaksanaan pemantauan kerugian negara/daerah dari jadwal sehingga penyelesaian LHPT pun tidak sesuai jadwal seharusnya.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berupaya untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LHPT Runeg ke Ditama Revbang untuk Tahun 2017, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Perbandingan realisasi IKU 4.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	62,50%

SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan delapan IKU, yaitu IKU 5.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, IKU 5.2 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 5.3 - Persentase Penyusunan *Best-Practice*, IKU 5.4 - Persentase Penyebaran *Best-Practice*, IKU 5.5 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, IKU 5.6 - Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan, IKU 5.7 - Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan, dan IKU 5.8 - Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana.

1. IKU 5.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, maka Perwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 219m/ND/XI/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016, Perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 83,81% atau dengan kategori “A” (Memuaskan). Dengan demikian, capaian atas IKU 5.1 telah sesuai dengan target Tahun 2016 yaitu “A”. Untuk itu, realisasi capaian IKU 5.1 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IKU 5.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A	A

2. IKU 5.2 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi.

Mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari pemanfaatan TI dan tingginya biaya untuk membangun infrastruktur TI, maka membudayakan “IT Culture” di lingkungan organisasi merupakan syarat mutlak. Untuk itu, beberapa aplikasi TI dijadikan indikator dalam mengukur capaian IKU 5.2 yaitu: SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, dan portal e-Audit. Realisasi capaian IKU 5.2 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IKU 5.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	79,36%	79,36	100	100

Target IKU 5.2 pada tahun 2016 tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan masih banyak pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memanfaatkan e-mail dan e-drive internal BPK. Adapun pemanfaatan portal e-Audit tidak maksimal dikarenakan sebagian besar pemeriksa hanya mengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifest dari maskapai penerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2016 di Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1) Layanan Dasar: email dan e-drive: 74,72%; (2) Layanan Aplikasi Umum: SISDM: 89,05%; (3) Layanan Pemeriksaan: SMP dan portal e-Audit: 66,30%.

Perbandingan realisasi IKU 5.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	79,36%

3. IKU 5.3 – Persentase Penyusunan *Best-Practice*

IKU 5.3 digunakan untuk mengukur penyusunan jumlah *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, Pengukuran atas capaian Penyusunan *Best-Practice* belum dilakukan pada tahun 2016, sehingga realisasi capaian IKU 5.3 pada 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IKU 5.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.3	Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.3. Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4. IKU 5.4 – Persentase Penyebaran *Best-Practice*

IKU 5.4 digunakan untuk mengukur penyebaran jumlah *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, Pengukuran atas capaian Penyebaran *Best-Practice* belum dilakukan pada tahun 2016, sehingga realisasi capaian IKU 5.4 pada 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IKU 5.4 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.4 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.4. Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	0%	0%	0%	0%	0%

5. IKU 5.5 – Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

IKU 5.5 digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara tepat waktu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK. LAK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 disampaikan kepada Kepala Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 64/ND/XVIII.BDG/02/2016 tanggal 15 Februari 2016, sehingga realisasi capaian IKU 5.5. pada tahun 2016 adalah:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IKU 5.5 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.5 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.5. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. IKU 5.6 – Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

Tujuan IKU ini adalah untuk mendorong unit kerja agar menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan, yaitu tanggal 10 di bulan berikutnya. Capaian IKU 5.6 Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada 2016 adalah 100% dengan skor 100, artinya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 menyampaikan laporan bulannya secara tepat waktu. Adapun realisasi capaian IKU 5.6 Tahun 2016 adalah:

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IKU 5.6 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.6 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. IKU 5.7 – Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

Media relation dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPK kepada *stakeholders* BPK, antara lain para insan media. Media merupakan sarana yang paling efektif untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 adalah menyusun siaran pers atas kegiatan perwakilan, melaksanakan konferensi pers pada saat Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Barat TA 2015 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat (DPRD), *Media Workshop* pada 23 Agustus 2016, dan *talkshow* melalui TVRI Stasiun Jawa Barat pada 20 Desember 2016.

Adapun realisasi capaian IKU 5.7 Tahun 2016 adalah:

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IKU 5.7 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.7	Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3,4	105	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.7 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.7. Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	3,4

8. IKU 5.8 – Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja merupakan pendorong tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

IKU ini bertujuan untuk menilai rata-rata persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2016, Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mencapai pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja sebesar 97,12% atau melebihi target 95% dengan skor 105. Pencapaian ini meningkat dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017 Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha mempertahankan pencapaian IKU ini.

Adapun realisasi capaian IKU 5.8 Tahun 2016 adalah:

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IKU 5.8 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	105	101,99	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.8 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%	97,12%

SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu IKU 6.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan IKU 6.2 - Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

1. IKU 6.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa per tahunnya adalah 40 jam. IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.

Untuk tahun 2016, realisasi IKU 6.1 adalah sebesar 85,45% dengan skor kinerja 85,45. Nilai IKU 6.1 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengan tingginya frekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan. Realisasi capaian IKU 6.1 pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IKU 6.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	85,45%	85,45	73,08%	76,47%

Untuk Tahun 2017, Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha untuk meningkatkan pencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pemeriksa minimal 40 jam dalam satu tahun. Salah satu upaya adalah melaksanakan diklat yang diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuan Pusdiklat.

Perbandingan realisasi IKU 6.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
6.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	85,45%

2. IK 6.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yang diemban.

Untuk tahun 2016, realisasi IKU 6.2 adalah sebesar 62,90% dengan skor kinerja 69,89. Nilai IKU 6.2 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. Kondisi tersebut disebabkan beberapa jadwal pelaksanaan diklat dilaksanakan bersamaan dengan waktu penugasan di lingkungan Sekretariat Perwakilan.

Realisasi capaian IKU 6.2 pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IKU 6.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	62,90%	69,89	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 6.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
6.2. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	92%	93%	62,90%

SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Pelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

Melalui Sasaran Strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU, yaitu IKU 7.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1. IKU 7.1- Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Tujuan IKU 7.1 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari empat indikator, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2016 mencapai 91,40% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% dengan skor 105. Pencapaian ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2015 sebesar 93,13%.

Realisasi capaian IKU 7.1 pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IKU 7.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016

IKU	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian IKU		
				2016	2015	2014
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	91,40%	105	103,48	N/A

Perbandingan realisasi IKU 7.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%	91,40%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	23.275.726.000,00	20.598.033.886,00	88,50%
2	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	1.310.891.000,00	1.167.693.984,00	89,08%
3	Manajemen Sumber Daya Manusia	12.357.760.000,00	11.703.434.627,00	94,71%
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	608.152.000,00	606.099.999,00	99,66%
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	5.518.028.000,00	5.204.842.548,00	94,32%
Total anggaran		43.070.557.000,00	39.280.105.044,00	91,20%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memuat baik keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2016 adalah 96,15, dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara, Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang, Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP, Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan, Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Perwakilan, Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan, Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dan Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan.

Terdapat 2 (dua) IKU bonus yaitu Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH (IKU 1.3) dan Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli (IKU 1.5) yang tidak terdapat realisasinya. Namun, dikarenakan IKU bonus, maka ketiadaan realisasi tidak mengurangi skor kinerja. Kemudian terdapat 2 (dua) IKU yaitu Persentase Penyusunan *Best-Practice* (IKU 5.3) dan Persentase Penyebaran *Best-Practice* (IKU 5.4) yang belum dihitung pada Tahun 2016.

Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 6 (enam) IKU yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;
2. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP;
3. IKU 4.3 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang;
4. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;

5. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa; dan
6. IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Namun demikian, capaian target kinerja secara keseluruhan pada 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Kesiapan sebagian besar entitas di Jawa Barat yang terlambat menyampaikan LK *Unaudited* kepada BPK, selain itu Tim Pemeriksaan LK banyak yang menyelesaikan LHP tidak sesuai waktu yang dijadwalkan, karena banyak permasalahan dari entitas itu sendiri, sehingga diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam penyelesaian penyusunan LHP LK.
2. Sebagian besar pemanfaatan portal e-Audit digunakan untuk mengecek manifest pada saat pemeriksaan LKPD dan pemeriksaan DTT. Namun demikian, Pada triwulan III Tahun 2016, sebagian besar jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksian kinerja dengan memanfaatkan portal kinerja yang tidak merupakan komponen penilaian dari IKU 5.2. Selain itu banyak pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas yang belum memanfaatkan secara maksimal terhadap email dan e-drive BPK.
3. Jadwal diklat sering bersamaan waktunya dengan tugas pemeriksaan/kesekretariatan yang harus segera diselesaikan, serta penawaran jadwal diklat kesekretariatan yang tidak pas, sering kali jadwal diklat untuk kesekretariatan yang ditawarkan pada semester I, padahal pada saat yang sama banyak pegawai pada sekretariat perwakilan diperbantukan dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan secara serentak.

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	60,17%	100,29
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,26	105
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	0%	0
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	102%	102
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	0%	0
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	22%	22,50%	102,30
	IKU 2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	65,82%	65,82
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	55,33%	55,33
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
	IKU 4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	62,50%	62,50
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	79,36%	79,36
	IKU 5.3	Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3,4	105
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	105
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	85,45%	85,45
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	62,90%	69,89
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	91,40%	105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp43.070.557.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp39.280.105.044,00

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	60,17%	100,29
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,26	105
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	0%	0
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	102%	102
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	0%	0
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	22%	22,50%	102,30
	IKU 2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	65,82%	65,82
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	55,33%	55,33
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
	IKU 4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	62,50%	62,50
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	79,36%	79,36
	IKU 5.3	Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3,4	105
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	105
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	85,45%	85,45
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	62,90%	69,89
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	91,40%	105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp43.070.557.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp39.280.105.044,00

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Syifa
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

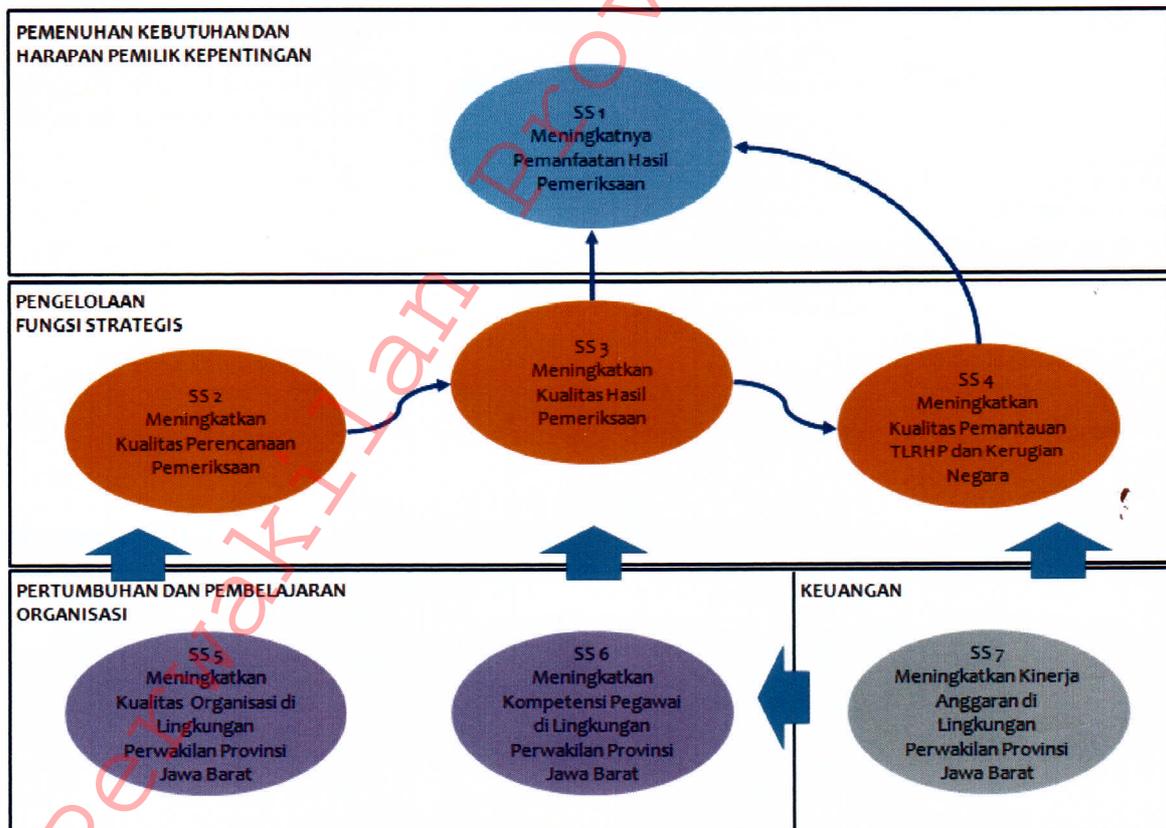
Nama : Bambang Pamungkas
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

Peta Strategi



IKU dan Target IKU Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	15%	
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	
	IKU 5.3	Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	0%	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	
	IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	
	IK 5.6	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IK 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
	IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

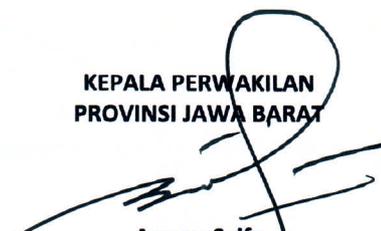
Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp. 23.275.726.000,00
Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	Rp. 1.310.891.000,00
Manajemen Sumber Daya Manusia	Rp. 12.357.760.000,00
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Rp. 608.152.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	Rp. 5.518.028.000,00
Total Anggaran	Rp. 43.070.557.000,00

Jakarta, 29 Januari 2016

TORTAMA KN V


Bambang Pamungkas

KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA BARAT


Arman Syifa

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat